

**HARI JADI KABUPATEN AGAM:
PERSPEKTIF HISTORIS DAN HISTORIOGRAFIS***

Gusti Asnan

(Staf Pengajar Jur. Sejarah Fak. Ilmu Budaya, Univ. Andalas Padang)

Adanya hari jadi bagi sebuah daerah baik setingkat propinsi atau kabupaten serta kota telah merupakan suatu keharusan di Indonesia akhir-akhir ini. Gejala yang mulai muncul pada dasawarsa 1970-an tampaknya masih akan tetap berlanjut, apalagi akhir-akhir ini – seiring dengan gerakan otonomi daerah – berbagai propinsi, kabupaten dan kota semakin membutuhkan adanya hari jadi itu. Hari jadi tidak hanya berarti sebagai suatu hari atau tanggal yang patut dikenang atau diperingati secara seremonial belaka, tetapi yang lebih penting dari itu adalah dijadikannya hari jadi tersebut sebagai patokan guna mengukur sejauh mana kemajuan yang dicapai dan seberapa banyak perubahan yang dialami oleh propinsi, kabupaten atau kota waktu ke waktu.

Sejarah pencarian hari jadi propinsi, kabupaten dan juga kota di Indonesia dimulai dari usaha yang dirintis oleh daerah atau kota-kota besar di Pulau Jawa. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Surabaya tercatat sebagai daerah dan kota yang pertama kali melakukannya. Upaya itu sudah dilakukan pada pertengahan dasawarsa 1970-an. Di tingkat Propinsi Sumatera Barat usaha pencarian hari jadi dilakukan pertama kali oleh kota Padang. Namun berbeda dari daerah atau kota-kota besar di Pulau Jawa, kota Padang mulai melakukannya pada pertengahan tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1986. Usaha kota Padang dilanjutkan oleh Bukittinggi. Selanjutnya kegiatan serupa juga dilakukan kota Payakumbuh, Solok, dan beberapa kota serta kabupaten lainnya.

Bila dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jakarta, Surabaya dan Padang serta Bukittinggi, usaha yang dilakukan Kabupaten Agam hari ini

* Disajikan pada “Seminar Sehari Hari Jadi Kabupaten Agam” di Lubuk Basung, Tanggal 5 November 2020.

yakni mengadakan seminar mencari hari jadinya dirasa sudah relatif terlambat. Namun, dengan merujuk kepada sebuah ungkapan yang sudah begitu populer di Barat sana, “siapa yang menemukan paling akhir, itulah temuan yang paling sempurna”, kita berharap bahwa penyelenggaraan seminar pencarian hari jadi Kabupaten Agam hari ini akan membuahkan hasil yang betul-betul memuaskan kita semua, sebab banyak pengalaman mencari hari jadi yang dimiliki daerah atau kota-kota sebelum ini yang bisa kita manfaatkan.

Karena itu sebelum sampai pada diskusi hari jadi Kabupaten Agam ada baiknya kita bicarakan dulu mengenai beberapa kecenderungan yang ada selama ini tentang proses pencarian hari jadi itu.

Beberapa Kecenderungan dan Pendekatan Pencarian Hari Jadi

Seperti disebut sebelumnya, penetapan hari jadi daerah tingkat propinsi, kabupaten dan kota telah dimulai sejak tahun 1970-an dan tetap berlanjut hingga beberapa waktu belakangan. Bila kita lihat dari perspektif politik, maka upaya-upaya itu dilakukan pada dua periode sistem politik; pertama, Era Orde Baru dan Era Reformasi. Kedua periode waktu ini menghadirkan tiga kecenderungan utama dalam penetapan hari jadi dan ketiganya memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

1. Pada masa Orde Baru terdapat kecenderungan untuk menetapkan hari jadi pada suatu titik waktu yang jauh di masa silam. Dengan kata lain, “makin tua, makin diminati”. Apa yang dilakukan oleh Jakarta, Surabaya dan Padang serta Bukittinggi misalnya adalah contoh nyata dari kecenderungan yang pertama ini. Kesemua kota itu telah berumur beratus-ratus tahun. Jakarta memilih tanggal 22 Juni 1527, Surabaya memilih tanggal 31 Mei 1293, Padang memilih tanggal 7 Agustus 1669, dan Bukittinggi memilih tanggal 22 Desember 1784.
2. Pada masa Orde Baru ada kecenderungan mengaitkan penetapan hari jadi dengan peristiwa atau kejadian yang mengandung unsur heroisme, adanya semangat perlawanan fisik dari daerah atau kota (warga daerah/kota) yang bersangkutan terhadap penjajah. Pengalaman kota Jakarta dan Padang adalah contoh nyata dari kecenderungan kedua ini. Jakarta mengambil hari jadinya

pada tanggal 22 Juni 1527 karena dikatakan bahwa pada hari itu ada kesatuan tentara yang dipimpin Pangeran Jayakarta menyerang Sunda Kelapa yang telah dikuasai oleh VOC. Jayakarta berhasil menguasai kota itu untuk beberapa lama serta mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta (nama yang akhirnya berubah menjadi Jakarta). Padang memilih tanggal 7 Agustus 1667 sebagai hari lahirnya, karena pada saat itu, dikatakan bahwa penduduk Pauh yang didukung oleh penduduk beberapa kampung lain di kota Padang menyerbu loji Belanda yang ada di Muaro.¹

3. Pada masa Orde Baru ada irasionalitas yang tinggi dalam penentuan tanggal (hari jadi). Kasus kota Bukittinggi adalah contoh yang paling nyata. Seminar penelusuran hari jadi kota itu diikuti oleh sejumlah sejarawan dan peminat sejarah terkemuka Indonesia (termasuk dari Sumatera Barat). Diakhir seminar direkomendasikan untuk memilih tanggal pendirian Sekolah Raja sebagai hari jadi kota. Pendirian Sekolah Raja dianggap sebagai momen paling bersejarah, tidak hanya bagi Bukittinggi, tetapi untuk Sumatera Barat atau juga Indonesia secara keseluruhan. Pendirian Sekolah Raja merupakan cikal bakal dari lahirnya golongan terpelajar Urang Awak yang kemudian menjadikan Minangkabau sebagai daerah yang dianggap sebagai salah satu daerah yang paling maju dan terpelajar di Indonesia (setidaknya hingga tahun 1950-an). Dan kaum terpelajar Minang (juga tamatan Sekolah Raja) memiliki peran yang penting di panggung sejarah politik dan sosial serta budaya Indonesia). Sebagian besar tokoh Minangkabau (dan Indonesia) adalah tamatan Sekolah Raja. Namun, rekomendasi itu tidak disetujui oleh “sejumlah tokoh daerah”, dengan alasan “kok hari jadi kota kita dikaitkan dengan produk kolonialialis Belanda?”. Akhirnya, oleh seseorang (Syafnir Abu Naim), disebutlah adanya informasi dari sebuah naskah (*Naskah Fakhir Sangir*) tentang peristiwa pembangunan pasar di Bukittinggi. Peristiwa itu bernuansakan lokal dan cocok dengan Bukittinggi sebagai kota dagang. “Tokoh daerah” setuju dengan usulan

¹ Tentu ada pengecualian, seperti yang dilakukan kota Bukittinggi yang mengaitkan hari lahirnya dengan peristiwa ekonomi. Tetapi salah satu unsur dari kecenderungan tersebut tetap dimiliki, yakni titik waktu yang dipilih jauh dikelampauan.

tersebut, maka dirombaklah kesepakatan (rekomendasi seminar). Diambilah pembangunan pasar itu sebagai dasar sejarah kota Bukittinggi. Sesuatu yang paling menarik adalah, Syafnir Abu Naim, tidak tahu tanggal pasti pembangunan pasar tersebut. Akhirnya, dicari-carinya suatu tanggal melalui diskusi-diskusi kecil. Kemudian, setelah mendengarkan pendapat berbagai pihak, disepakatilah untuk mengambil tanggal 22 Desember sebagai hari jadi. Alasannya, tanggal itu adalah hari lahir PDRI. Untuk tahunnya diambil 1784 yang dikatakan sebagai tahun mulai gerakan pembaharuan Islam yang dilancarkan oleh Tuanku Nan Tuo (yang sebetulnya diambil judul buku Chistine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847* (1983)). Maka 'diadulah' tanggal pengumuman PDRI dan tahun permulaan gerakan pembaharuan Islam yang dilancarkan Tuanku Nan Tuo dengan pendirian pasar sebagai dasar sejarah kota Bukittinggi. Sebuah irasionalitas yang bersangatan.

Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan hari jadi DKI Jakarta. Ada banyak perdebatan tentang penetapan hari jadi ibu kota RI tersebut, dan banyak pula suara yang tidak setuju. Salah satu diantaranya Adolf Heuken yang mengatakan:

“.....hari jadi Jakarta hanyalah sebuah dongeng. Karena, katanya, tak ada dokumen yang menyebutkan nama Jayakarta. Bahkan 50 tahun sesudahnya (saat VOC berkuasa), tetap disebut Sunda Kelapa. Fatahillah adalah orang Arab. Jelaslah tidak mungkin apabila orang Arab memberi nama sesuatu dengan bahasa Sanskerta. Jayakarta adalah nama dari bahasa Sanskerta. Jadi, itu semua dongeng supaya Jakarta memiliki hari ulang tahun” (https://id.wikipedia.org/wiki/Penetapan_hari_jadi_Jakarta).

Pola penelusuran dan pencarian hari jadi pada Era Reformasi menampilkan kecenderungan yang lain. Tiga diantaranya adalah:

1. Penetapan hari lahir umumnya jatuh pada kurun waktu yang lebih muda (kontemporer).
2. Penetapan hari jadi umumnya dikaitkan dengan dasar politik-administrasi, *besluit* atau surat keputusan pembentukan daerah (propinsi, kabupaten atau kota) yang bersangkutan.

3. Penetapan tanggal lebih rasional serta didukung oleh data-data yang empiris.

Ada banyak contoh untuk kasus ini, baik pada tingkat propinsi atau kabupaten atau kota yang termasuk kelompok ini. Beberapa contoh yang paling dekat adalah Propinsi Riau, Kabupaten Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, dan terakhir penetapan hari jadi Propinsi Sumatera Barat yang baru ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Semua propinsi, kabupaten dan kota yang terbentuk sebagai hasil pemekaran pada Era Reformasi juga menentukan hari jadinya berdasarkan pola ini.

Mengapa ada perbedaan yang sangat mencolok antara kedua era di atas?

Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa kita carikan pada ‘hukum’ yang berlaku proses rekonstruksi sejarah (historiografi). Dalam ilmu sejarah ada pernyataan yang berbunyi “setiap penulisan sejarah, selalu dipengaruhi oleh jiwa zaman (*Zeitgeist*) dan latar belakang budaya (*Cultuur Gebundenheid*) yang berkembang pada saat penulisan dilakukan”.

Era Orde Baru, apalagi pada dekade-dekade permulaannya, adalah masa-masa yang diisi dengan kecenderungan untuk memuliakan tradisi, penumbuhan semangat patriotisme, penumbuhan semangat persatuan dan kesatuan, dan pemujaan pada perjuangan fisik. Masa Orde Baru juga ditandai dengan pembungkaman sikap kritis dan demokratis. Dalam jiwa zaman dan latar belakang budaya seperti ini, maka sangat masuk akal, bila rekonstruksi sejarah hari jadi daerah (propinsi, kabupaten dan kota) bercirikan seperti yang disebut sebelumnya.

Sebaliknya, Era Reformasi, apalagi pada hari-hari pertamanya, ditandai oleh sikap kritis, rasional, dan demokratis. Era Reformasi adalah era orang-orang muda (generasi milenial) melek IT, progresif, dan anti romantisisme pada masa lalu yang dianggap konservatif. Jiwa zaman dan latar belakang sosial, politik dan budaya seperti ini jelas akan menghadirkan rekonstruksi sejarah yang lebih rasional dan berdasarkan sumber yang empiris serta disetujui oleh orang banyak.²

² Dewasa ini, semakin jauh kita melangkah dalam era reformasi, maka spirit awal reformasi sudah mulai mengendur. Pada sebagian kelompok masyarakat, sikap kritis, rasionalitas dan demokratis mulai tersingkir atau disingkirkan. Ahir-akhir ini mulai ada elit atau sebagian kelompok (tokoh) masyarakat yang suka memaksakan kehendak. Praktik-praktik politik ala Orde Baru, atau lebih jelek dari Orde Baru, mulai muncul lagi. Pengalaman seperti ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga pada level daerah, termasuk di Sumatera Barat. Hal

Dalam suasana seperti inilah kita melakukan seminar mencari hari jadi Kabupaten Agam hari ini. Karena itu saya akan lebih mengonsentrasikan pembahasan saya kepada pencarian hari jadi Kabupaten Agam melalui penelusuran sumber-sumber sejarah dan pola rekonstruksi sejarah. Maksudnya, saya ingin mendiskusikan hari jadi Kabupaten Agam berdasarkan bukti-bukti empiris kapan daerah ini dibentuk sebagai sebuah unit administratif, atau pengalaman daerah ini sebagai sebuah daerah administratif.

Sebelum masuk kepada suatu rumusan/tawaran terhadap kejadian atau titik waktu tertentu, pada bagian berikut ini akan saya coba tampilkan perjalanan sejarah Agam sebagai sebuah daerah administratif terlebih dahulu. Penyamaan persepsi dan pengetahuan tentang sejarah daerah ini saya pikir perlu dilakukan, karena kebetulan dari beberapa tulisan yang dibuat selama ini saya pikir kurang sesuai kenyataan historis.

Lintasan Historis Daerah Administratif Kabupaten Agam

Dewasa ini, Agam adalah sebuah daerah administratif setingkat kabupaten. Di masa-masa sebelumnya, Agam pernah dijadikan unit administratif dengan nama yang berbeda-beda. Pada hari-hari pertama kemerdekaan dinamakan *luhak* (*Luhak Agam*), pada masa Jepang dinamakan *bunshu* (*Agam Bunshu*), pada masa penjajahan Belanda dinamakan *afdeeling* (*Afdeeling van Agam*).

Kabupaten, *luhak*, *bunshu* dan *afdeeling* adalah unit administratif di bawah propinsi, keresidenan, *shu*, dan *residentie*. Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 1956 hingga saat sekarang Kabupaten Agam adalah salah satu kabupaten yang

ini juga mempengaruhi atau berlaku pada upaya penelusuran hari jadi daerah. Bahkan, ada sekelompok elit atau sekelompok masyarakat daerah, yang dengan terang-terangan ingin mengganti hari jadi yang ditetapkan pada awal reformasi dengan tanggal yang sesuai dengan keinginan mereka. Seperti ingin menggantinya dengan tanggal atau titik waktu yang jauh dimasa silam, serta dasar penetapan yang ndak masuk akal dan ahistoris. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Solok, dan Limapuluh Kota. Mereka misalnya ingin mengganti hari jadi Kabupaten Padang Pariaman dengan hari lahir Syekh Burhanuddin, Kabupaten Solok dengan hari lahir atau wafatnya Datuk Perpataih Nan Sabatang (yang kuburnya dikatakan ada di Solok), Kabupaten Limapuluh Kota dengan mulai pindahnya nenek moyang sebanyak 50 orang dari Tanah Datar ke Luhak Limapuluh Kota. Suatu titik waktu yang sesungguhnya mustahil bisa didapat. Namun usulan tersebut ditentang oleh kelompok masyarakat yang lain, yang umumnya terdiri dari kaum muda yang kritis.

ada di Propinsi Sumatera Barat. Sejak tahun 1946 hingga pertengahan 1950-an, Kabupaten Agam menjadi bagian dari Keresidenan Sumatera Barat. Penamaan Kabupaten Agam dipakai antara tahun 1946 hingga tahun 1956 dibawah unit administratif Keresidenan Sumatera Barat. Pada hari-hari pertama kemerdekaan unit administratif ini *Luhak Agam* dan menjadi bagian dari Keresidenan Sumatera Barat. Pada masa pendudukan Jepang *Agam Bunshu* menjadi bagian dari *Sumatora Nishi Kaigan Shu*. Sedangkan pada masa Belanda *Afdeeling van Agam* menjadi bagian dari *Residentie van Sumatra Westkust* dan juga menjadi bagian dari *Residentie van Padangsche Bovenlanden*.

Memiliki penamaan yang berbeda sekaligus merefleksikan cakupan wilayah yang berbeda. Senantiasa ada perubahan luas wilayah menjadi bagian dari berbagai unit administratif yang dinamai Agam ini. Perubahan-perubahan akan sangat terlihat bila kita telusuri perjalanan sejarah daerah administratif ini sejak hari-hari pertama keberadaannya.

Keberadaan Agam sebagai sebuah unit administratif setingkat *afdeeling* pertama kali terjadi pada tahun 1841. Pada tahun itu, berdasarkan *Besluit* No. 1 tertanggal 13 April 1841 diresmikanlah untuk pertama kali pemakaian Agam sebagai nama unit administratif setingkat *afdeeling*, yakni *Afdeeling van Agam*. Berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu, ditetapkan pula bahwa distrik menjadi unit bawahan dari *afdeeling*. Adapun distrik-distrik yang ada saat itu meliputi Distrik Agam (*Oud Agam*), Matua dan IV Koto, Kawasan Sekitar Danau, VIII Koto, VII Lurah, Bonjol, Binjai, IV dan VI Koto. Ibu kota *afdeeling* adalah Fort de Kock.

Segera setelah berakhirnya pemerintahan sipil-militer untuk Sumatera Barat tahun 1862, maka diadakan perubahan jumlah dan wilayah yang menjadi bagian *Afdeeling Agam*. Adapun distrik-distrik yang masuk Agam saat itu adalah Distrik *Oud Agam*, Distrik Danau en Matua, Distrik VIII Koto en VII Koto Lurah, Distrik Bonjol, serta Distrik Batipuh dan X Koto.

Dua tahun setelah itu, tepatnya tahun 1865, dilakukan reorganisasi pemerintahan di Sumatera Barat, dan Distrik Batipuh-X Koto dikeluarkan dari *Afdeeling Agam*, sehingga wilayah Agam menyusut menjadi Distrik Oud Agam,

Distrik Danau en Matua, Distrik VIII Koto en VII Koto Lurah, dan Distrik Bonjol.³

Sampai awal abad ke-20 telah terjadi lagi beberapa perubahan (reorganisasi) pemerintahan dan penataan daerah administratif di Sumatera Barat (juga di Agam). Namun reorganisasi-reorganisasi itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang berarti bagi daerah-daerah yang masuk dan menjadi bagian dari *Afdeeling Agam*.

Sebuah perubahan yang sangat besar, dalam artian memasukkan daerah-daerah yang dewasa ini menjadi bagian dari Kabupaten Agam, menjadi bagian dari *Afdeeling Agam* berlaku pada tahun 1913. Berdasarkan reorganisasi yang dinyatakan dalam *Staatblad voor Nederlandsch Indie* 1913 No. 321 dan diperkuat lagi oleh *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1913 No. 569 dan 1914 No. 3030 dikatakan bahwa *Afdeeling Agam* dibagi menjadi dua *Onderafdeelingen*, yaitu 1). *Oud Agam*, terdiri dari *Districten* Bukittinggi, IV Angkat dan Tilatang, di bawah pimpinan *Assistent Resident*, kepala *Afdeeling*, dibantu oleh seorang *Controleur* dari *Binnenlandsch Bestuur* dengan ibu kota Fort de Kock, dan; 2). Maninjau, terdiri dari *Districten* Matur, Danau dan Lubuk Basung, di bawah pimpinan seorang *Controleur* dari *Binnenlandsch Bestuur* dengan ibu kota Maninjau.

Tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda melakukan lagi reorganisasi pemerintahan di Sumatera Barat. Reorganisasi ini tidak banyak merubah kawasan yang menjadi bagian dari *Afdeeling Agam*. Namun reorganisasi yang dilakukan tahun 1935, berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal tertanggal 10 September 1935 No. 26 dan dimuat dalam *Staatsblad voor Nederlandsch Indie* 1935 No. 450 terdapat perubahan yang cukup mendasar bagi kawasan/teritorial *Afdeeling Agam*. Berdasarkan reorganisasi itu hampir semua daerah yang masuk Kabupaten Agam sekarang menjadi bagian dari *Afdeeling Agam*. Daerah-daerah yang dimaksud adalah: 1). *Oud-Agam*, terdiri dari *District* Bukittinggi dan Tilatang-IV Angkek. *District* Bukittinggi terbagi lagi ke dalam *Onderdistricten* Sarik-Bukittinggi dan IV Koto serta *District* Tilatang-IV Angkek dibagi lagi ke dalam *Onderdistrict* Tilatang, Kamang-Baso dan IV Angkek-Canduang. Pemimpin tertinggi di

³ Lihat juga, *Schet van het Eiland Sumatra* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1867), hal. 111-112.

Onderafdeeling ini langsung dipegang oleh Asisten Residen – Kepala *Afdeeling* – namun dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Bukittinggi.; 2). Maninjau yang terdiri dari *District* Maninjau. *District* ini juga dibagi ke dalam *Onderdistricten* Maninjau, Palembayan, Matur dan Lubuk Basung. Pimpinan tertinggi berada di tangan seorang *Controleur* yang berkedudukan di Maninjau.⁴

Pada masa pendudukan Jepang terjadi sebuah perubahan lagi dalam bentuk dan kawasan teritorial Agam. Nama unit administratif waktu itu dirubah dari *afdeeling* menjadi *bunshu*, yakni *Agam Bunshu* yang dikepalai oleh seorang *Bunshu Cho*. Daerah atau wilayahnya juga tidak mengalami perubahan. Daerah yang menjadi bagian dari *Agam Bunshu* adalah identik dengan dua *afdeeling* yang disebut di atas, yakni Saria-Bukittinggi dan IV Koto, Tilatang, Kamang-Baso dan IV Angkek-Canduang, Maninjau, Palembayan, Matur dan Lubuk Basung.

Segera setelah Indonesia merdeka, seiring dengan pembentukan Keresidenan Sumatera Barat, nama *Agam Bunshu* dirubah menjadi *Luhak Agam*, daerah teritorialnya relatif sama dengan *Agam Bunshu*. Hal ini tetap berlaku hingga terjadi perubahan tahun 1948 dan 1956 (menjadi Kabupaten Agam pada Keresidenan Sumatera Barat). Sebuah perubahan yang cukup mendasar terjadi tahun 1956 yakni dengan dimasukkannya Tiku menjadi bagian dari Kabupaten Agam. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi “sosok” Kabupaten Agam dewasa ini.⁵

⁴ Di samping dua *onderafdeeling* di atas, juga ada dua lagi *onderafdeeling* yang masuk *Afdeeling* Agam, yakni *Onderafdeeling Lubuk Sikaping* dan Talamau. Beluit Gubernur Jenderal tertanggal 10 September 1935 No. 26 dan dimuat dalam *Staatsblad voor Nederlandsch Indie* 1935 No. 450.

⁵ Sebuah diskusi yang cukup lengkap mengenai perkembangan daerah administratif di Sumatera Barat pasca kemerdekaan dapat dilihat dalam Gusti Asnan, *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat: Dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Dian Pustaka, 2006), hal. 125ff:

Pengalaman Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Agam

Berdasarkan penjelasan dari lintasan perjalanan sejarah daerah administratif Agam di atas, rasanya sangat menarik untuk memberikan perhatian kepada tahun 1841, 1913, dan 1956. Ada sejumlah alasan yang menyebabkan tiga titik waktu tersebut perlu diberi perhatian khusus.

1. Tahun 1841 adalah tahun pertama nama Agam dipergunakan sebagai penamaan unit administratif, yakni *Afdeeling Agam*.
2. Tahun 1913 adalah tahun dilaksanakannya reorganisasi yang menjadikan sebagian besar daerah yang menjadi bagian dari Kabupaten Agam dewasa ini terhimpun menjadi bagian dari sebuah unit administratif.
3. Tahun 1956 adalah tahun dilaksanakannya reorganisasi yang menjadikan seluruh daerah yang menjadikan wilayah Agam saat sekarang terhimpun menjadi satu dalam unit administratif. Tahun itu ada penambahan wilayah Tiku (Tanjung Mutiara) dari keadaan kondisi sebelumnya (perluasan teritorial dari hasil reorganisasi tahun 1913 dan 1935).

Tiga titik waktu di atas layak dipertimbangkan untuk menjadi dasar pemilihan hari jadi Kabupaten Agam. Namun tentu tidak mungkin untuk memilih ketiga titik waktu itu. Lalu titik waktu manakah yang paling layak untuk dipertimbangkan?

Dari tiga titik waktu itu, kiranya yang paling layak dipertimbangkan adalah tahun 1841 tanggal 13 April.

Mengapa?

Ada sejumlah alasan yang bisa dijadikan dasar pemilihan tanggal ini.

1. Pertama, titik waktu tersebut adalah titik pangkal atau titik awal adanya unit administratif setingkat *afdeeling*, *bun*, *luhak* atau kabupaten yang dinamai Agam.
2. Dasar keberadaannya jelas, adanya *Besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda No 1/1841, tanggalnya juga tegas, yakni saat ditandatanganinya *besluit* tersebut.

3. Pemilihan waktu ini akan cocok dengan semangat generasi sekarang (dan generasi yang akan datang), yang merupakan orang-orang yang kritis, rasional, empiris, dan bicara/berbuat dengan data.
4. Sejak saat tahun 1841 kita bisa mengukur dan mengetahui apa-apa saja yang berubah dan tetap berlaku (berlanjut) pada unit administratif ini.

Mengapa tidak tahun 1913 atau 1956?

Reorganisasi tahun 1913 dan 1956 memang memiliki arti yang penting, Reorganisasi 1913 misalnya menjadi tonggak penting, yakni pertama kalinya terhimpun hampir semua daerah yang menjadi bagian Kabupaten Agam dewasa ini kedalam satu unit administratif. Namun, apa yang telah terbentuk tahun 1913 ternyata mengalami perubahan lagi tahun 1935. Reorganisasi tahun 1956 sesungguhnya juga sangat penting bagi persatuan dan penyatuan seluruh wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Agam dewasa ini. Namun, berdasarkan pengalaman di masa lalu, saya yakin, wilayah/teritorial Agam dewasa ini, suatu saat nanti akan berubah. Berdasarkan pengalaman sejarah, saya memprediksi bahwa Kabupaten Agam dimasa yang akan datang akan dimekarkan. Akan ada bagian dari Kabupaten Agam dewasa ini yang akan memekarkan diri. Sehingga menjadi tahun reorganisasi tahun 1913 dan 1956 sebagai dasar hari jadi dirasa tidak cocok, karena peristiwa itu bukanlah klimaks dari persatuan dan kesatuan Agam.

Karena itulah, saya merasa, tanggal 13 April 1841 sebagai titik waktu yang paling tepat untuk dipilih sebagai hari jadi Kabupaten Agam. Karena pada titik waktu itulah unit administratif ini mulai dibentuk dan sejak saat itulah nama Agam tetap digunakan, walaupun sejumlah perubahan, baik wilayah atau penamaan unit administrasinya telah terjadi.

Tetapi, tanggal atau momen itu kan bentukan Belanda, pemerintah kolonial? Apakah cocok dengan semangat keindonesiaan, kebangsaan dan nasionalisme kita?

Saya pikir cocok. Keindonesiaan, kebangsaan dan nasionalisme sesungguhnya juga bisa diukur dari bagaimana kita menerima kenyataan historis, bahwa kita ada karena produk sejarah. Bangsa Indonesia, negara Indonesia, rakyat

Indonesia khususnya terbentuk karena sejarah, dan kolonialisme Belanda adalah bagian dari sejarah kita. Dengan kata lain, bangsa Indonesia, negara Indonesia dan rakyat Indonesia terbentuk karena adanya kolonialisme. Penjajah Belandalah yang membentuk kita. Seandainya tidak ada penjajahan Belanda, niscaya tidak akan ada bangsa Indonesia, tidak akan ada negara Indonesia, dan tidak akan ada rakyat Indonesia. Kalaulah tidak ada penjajahan Belanda, bisa dipastikan, bahwa saat sekarang akan ada Kerajaan Aceh, Kesultanan Deli, Kerajaan Siak, Jambi, Palembang, Banten, Mataram, Bali, dlsbnya di kawasan kepulauan ini. Dan masing-masing unit politik tersebut akan menjadi kelompok sosial yang mengatasnamakan bangsa dari masing kerajaan atau kesultanan itu. Bisa jadi pula, antara kerajaan/kesultanan atau bangsa yang satu dengan yang lain akan saling bersiteru dan saling menggempur. Hal ini adalah watak penduduk yang mendiami kawasan ini.

Secara empiris kita bisa membuktikan bahwa penjajahan Belandalah yang menjadi dasar bagi munculnya semangat kebangsaan di kalangan pemuda terdidik dari berbagai etnik dan kerajaan atau kesultanan di Indonesia pada awal abad ke-20. Karena adanya nasib sepenganggungan dijajah kolonialis Belanda itulah munculnya kesadaran berbangsa dari pemuda terpelajar kita pada awal abad ke-20. Dan sebagian dari mereka adalah Uang Awak, bahkan juga orang Agam. Penjajahan pulalah yang menjadi dasar terbentuknya berbagai unit administratif yang menjadi bagian dari RI, produk hukum, lembaga-lembaga pemerintahan, unit sosial, politik, ekonomi, dlsbnya yang ada di Indoensia dewasa ini. Tentu saja terbentuknya Kabupaten Agam dan Orang Agam.

Sehingga bisa dikatakan bahwa Kabupaten Agam adalah juga produk sejarah, dan kolonialis Belanda punya peran besar dalam pembentukan daerah administratif ini. Kalaulah tidak ada penjajahan Belanda, bisa dipastikan tidak akan pernah ada Kabupaten Agam dewasa ini, tidak akan terbentuk *Afdeeling van Agam* (seperti yang dikenal pada masa penjajahan Belanda), dan tidak akan wujud *Agam Bunshu* (seperti yang ada pada masa pendudukan Jepang), tidak akan ada *Luhak Agam* (seperti dibentuk pada awal kemerdekaan), dan tidak akan ada Kabupaten Agam (pada masa revolusi hingga yang kita dapati dewasa ini).

Dengan sangat jelas dan terang benderang, cikal bakal unit administratif ini dan wilayahnya dibentuk oleh kolonialis Belanda.

Pengakuan dan pengapresiasian terhadap kontribusi kolonialis Belanda dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan Indonesia umumnya dan Kabupaten Agam khususnya adalah bagian perwujudan bahwa kita adalah manusia rasional, memiliki akal sehat, dan jujur.

Pengambilan hari lahir Kabupaten Agam pada tanggal terbentuknya *Afdeeling van Agam* adalah perwujudan dari sikap kita yang menjunjung tinggi kaidah serta norma ilmu (sejarah) yang menuntut bukti-bukti adanya data (sumber) yang empiris dalam pengungkapan suatu peristiwa sejarah. Dengan memilih tanggal terbentuknya *Afdeeling van Agam* pertama kali sebagai hari jadi Kabupaten Agam kita sekaligus mewakili semangat zaman sekarang serta masa datang, yang rasional, kritis, demokratis dan empiris. Dan dengan memilih tanggal itu kita juga mengakomodasi semangat kaum muda milenial yang progresif, melihat apa adanya, lebih mengedepankan akal sehat, serta anti romantisisme pada masa lampau dengan makna-makna yang dicari-cari, yang menyiratkan suara dan paham kaum konservatif.

Dengan semangat dan alasan-alasan itulah, sekali lagi, saya memilih tanggal 13 April 1841 sebagai hari jadi Kabupaten Agam. Wassalam.

-----ooo0ooo-----